

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, J., 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023, *Statistik Indonesia 2023*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Barkatullah, A. H., dkk, *Bahan Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusa Media, Jakarta.
- Budiarjo, M. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, H., 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Echols, J. H. dan Shadily, H., 1993, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Hadjon, P. M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Huda, N. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, P. M., 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Meija, J. dan Aliakbar, E., 2022, *Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies*, Fraser Institute, Calgary.
- Muchtar, S. A., 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung.
- Mustafa, B., 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, H., 2005, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Queensland Coal Exploration, 2017, *Environmental Impact Statement (EIS) assessment report under the Environmental Protection Act 1994: Hillalong Coal Project*, State of Queensland.
- Pudyatmotko, Y. S., 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, J., dan Sudrajat, A. S., 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Saleng, H. A., 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Santoso, L., 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sheppard, V., 2020, *Research Method for The Social Sciences: An Introduction*, Creative Commons, Mountain View.
- Sj., H. dan Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S., 1989, *Perbandingan Hukum*, Melati, Bandung.
- Soekanto, S. dan Marmudji, S., 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2009, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sumardjono, M. S. W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sutedi, A., 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syukri, A. F., 2009, *Standar Pelayanan Publik Pemda*, Kreasi Wacana, Bantul.
- United States Geological Survey, 2022, *Mineral Commodity Summaries 2022*, USGS Publications Warehouse, Reston.

Wahab, S. A., 2002, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo, B., 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zed, M., 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Asiyah, N. Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak, *Samudera Keadilan*, Vol.12, No.1, Januari-Juni 2017.

Aulich, C., From Citizen Participation to Participatory Governance in Australian Local Government, *Commonwealth Journal of Local Governance*, No. 2, Januari 2009.

B. J, Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Propinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Hutan, Pertambangan, dan Perkebunan), *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2012.

Cahyono, S., Negara Federasi Sebagai Kebutuhan atau Alternatif Bentuk Negara Republik Indonesia, *Perspektif*, Vol. 3, No. 3, Juli 1998.

Faisal dan Rahayu, D.P , Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No.2, Februari 2021.

Gunawan, M. S., dkk., Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Diskresi*, Vol.2, No.1, Juni 2023.

Hertanto, A. H., Kontrak Karya (Suatu Kajian Keperdataan), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.38, No.2, April-Juni 2008, hlm. 221-222.

Huroiroh, E., dkk., Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol.2, No. 1, Mei 2022.

Johson, E. L., dkk., The mining permitting process in selected developed economies, *Land Use Policy*, Vol. 131, Agustus 2023.

Mavisakalyan, A. dan Tarvedi, Y., Identity and support policies towards Indigenous people evidence from Australia, *Social Indicator Research*, Vol.167, No. 1-3, Mei 2023.

- Meissner, K., dan Everingham, J. A., Information Control and Competence: participant experience of public participation in EIA for proposed mining projects in Queensland, *Australasian Journal of Environmental Management*, Vol 28, No. 3, Juli 2021.
- Milta, C. B., & Mayarni, M., Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing, *Journal of Research and Development on Public Policy*, Vol.2, No.3, September 2023.
- Muin, F., Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Fiat Justicia*, Vol. 8, No. 1, Januari–Maret 2014.
- Nuradhawati, R., Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia, *Academia Praja*, Vol.2, No.1, Februari 2019.
- Puluhulawa, F. Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, Mei 2011.
- Rahayu, D.P dan Faisal, Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba, *Pandecta*, Vol. 16, No.1, Tahun 2021.
- Said, A. R. A., Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945, *Fiat Justicia*, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2015.
- Sari, I., Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, Maret 2015.
- T., A. B. dan Purwoko, B., Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling *Expressive Writing*. *Jurnal BK Unesa*, Vol. 4, no.1, Tahun 2017.
- Utomo, T. W. W., Dekonsentrasi Dan Desentralisasi Dalam Diskursus Negara Kesatuan Dan Negara Federal, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 9, No. 1, April 2012.
- Winterton, G., Comparative Law Teaching, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 1, Winter 1975.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Australia's Constitution

Commonwealth-State agreement (the Offshore Constitutional Settlement)

Commonwealth of Australia Constitution Act 1900

Environmental Protection Act 1994

Minerals Resources Act 1989

Mining Act 1978

Mining Act 1992 no. 29.

Native Title Act 1993

Offshore Mineral Act 1994

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6634)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6721)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2055)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2818)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2831)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6525)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856)

D. Hasil Penelitian

Andesi, S., 2019, *Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Setiawan, R. N., 2023, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Usaha Pertambangan di Dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Shahab, A. H., 2019, *Pembagian Kewenangan di Bidang Pertambangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

E. Putusan Pengadilan

Gloucester Resources Limited v Minister for Planning [2019] NSWLEC 7

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT

Waratah Coal Pty Ltd v Youth Verdict Ltd & Ors (No 6) [2022] QLC 21

F. Makalah/Pidato

Walker, G., d., Q., “Rediscovering Advantages of Federalism”, *Pidato*, Kuliah di Departement of the Senate Ocassional Lecture Series at Parliament House, Canberra, 19 Maret 1999.

G. Internet

Aditya, S., “Pengawasan Tambang Ditarik Pusat, Bureau Angkat Tangan Hutan Kota Ditambang”, <https://kaltimkece.id/par-iwara/pariwara-pemkab-berau/pengawasan-tambang-ditarik-pusat-berau-angkat-tangan-hutan-kota-ditambang> , diakses pada 27 Oktober 2023.

- Badan Legislasi DPR RI, “UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Lebih Maju”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju>, diakses pada 15 September 2023.
- Brenan, K. dkk, “Mining Law in Australia, ” <https://content.next.westlaw.com/practical-law/document/I8417b2421cb111e38578f7ccc38dcbee/Mining-law-in-Australia?viewType=FullText&contextData=%28sc.Default%29&transitionType=Default>, diakses pada 14 September 2023.
- Cunsolo, A., “Mining in Australia: overview”, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-576-7530?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#coanchor_a153844](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-576-7530?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#coanchor_a153844), diakses pada 13 September 2023.
- Department of Mines, Industry Regulation and safety, “Iron Ore: A look at Western Australia”, <https://dmp.wa.gov.au/Investors/Iron-Ore-1482.aspx#:~:text=A%20look%20at%20Western%20Australia,world's%20major%20iron%20ore%20provinces.>, diakses pada 5 Oktober 2023.
- Enerdata, “Coal and lignite Production”, <https://yearbook.enerdata.net/coal-lignite/coal-production-data.html>, diakses pada 11 September 2023.
- Fitriyanti, D. R., “Bupati Klaten Minta Pengusaha Tambang Galian C lengkapi Izin dan Taati Perda, ” <https://www.posjateng.id/warta/bupati-klaten-minta-pengusaha-tambang-galian-c-lengkapi-izin-dan-taati-perda-b2ftV9eWq>, diakses pada 27 Oktober 2023.
- Geoscience Australia, “ Australia’s Identified Mineral Resources 2023”, <https://www.ga.gov.au/digital-publication/aimr2022/australias-identified-mineral-resources>, diakses pada 12 September 2023.
- Geoscience Australia, “World Rankings”, <https://www.ga.gov.au/digital-publication/aimr2022/world-rankings>, diakses pada 12 September 2023.
- Gethen, B., “The Money-Making Capital of Australia”, <https://thebookkeepingstudio.com.au/tax-tips/money-making-capitalaustralia/#:~:text=Sydney%20is%20undeniably%20the%20financial,multinational%20corporations%2C%20and%20financial%20institutions>, diakses pada 1 Januari 2024.
- Industry Queensland, “ Mines In Queensland”, <https://industryqld.com.au/mines-in-qld/>, diakses pada 5 Oktober 2023.
- NSW Mining, “Coal”, <https://www.nswmining.com.au/coal#:~:text=There%20are%20operating%20mines%20south,to%20the%20west%20of%20Sydney.>, diakses pada 5 Oktober 2023.

OSS-RBA, “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha”, <https://oss.go.id/informasi/kbli-kategori/80c0849b-9130-4d23-af72-ff124380cac2>, diakses 25 Oktober 2023.

Pratama, R., “Pemda Tak Punya Kewenangan Atur Pertambangan, Marudur Saragi: Kita Ngurusi Dampaknya”, <https://belitung.tribunnews.com/2023/10/10/pemda-tak-punya-kewenangan-atur-pertambangan-marudur-saragih-kita-ngurusi-dampaknya>, diakses pada 27 Oktober 2023.

Sutton, A., “State by state: Mining Around Australia”, <https://www.barcaypearce.com.au/blog/state-by-state-mining-around-australia#:~:text=Wes%20Australia,-Mining%20in%20Western&text=WA%20is%20Australia's%20largest%20state,support%20a%20strong%20mining%20industry.>, diakses pada 5 Oktober 2023.

Sawal, R. dan Karokaro, A. S., “Menang Gugatan, Warga Dairi Desak KLHK Cabut Persetujuan Lingkungan PT Dairi Prima Mineral”, <https://www.mongabay.co.id/2023/08/02/menang-gugatan-warga-dairi-desak-klhk-cabut-persetujuan-lingkungan-pt-dairi-prima-mineral/>, diakses pada 27 Oktober 2023.

Vella, H., “Mining New South Wales: Climate change, coal, and opportunity”, <https://www.mining-technology.com/features/mining-new-south-wales-climate-change-coal-and-opportunity/?cf-view>, diakses pada 5 Oktober 2023.